BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN

PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMILU DAN PEMILIHAN

Divisi
Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Diklat

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

Bawaslu Rembang

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Saksi merupakan instrumen penting dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, mulai saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga rekapitulasi di tingkat akhir. Keberadaan saksi akan memberikan legitimasi hasil Pemilu/ Pemilihan., karena semua proses ada yang mengawasi serta menyaksikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga terhindar dari praktek-praktek kecurangan.

Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan pembekalan saksi peserta pemilu/ pemilihan. Perwakilan dari partai politik maupun pasangan calon diberikan wawasan terkait aturan main maupun prosedur yang dipedomani dalam tahapan yang melibatkan saksi.

Kegiatan pembekalan saksi diapresiasi oleh partai politik maupun saksi itu sendiri. Mereka merasa tercerahkan atas aturan yang mestinya dipedomani pada saat menjalankan tugas. Mereka juga tidak kuatir dicurangi, karena ada saksi yang sebagai kepanjangan tangan peserta pemilu dan pemilihan.

Laporan ini adalah bentuk pertanggung jawaban bidang sebagai PIC bimtek saksi.. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 10 Februari 2025
Ketua

Totok Suparyanto, S.E., M.H., C.Med.

PROLOG PENYUSUN

Dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pengawas adhoc melalui serangkaian program peningkatan yang sistematis dan terencana. Pengawas adhoc, yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dengan tantangan yang semakin kompleks dalam konteks demokrasi, penting bagi Bawaslu untuk memastikan bahwa para pengawas ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Tahapan pertama dalam proses peningkatan kapasitas ini adalah identifikasi kebutuhan yang mendalam. Melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc, Bawaslu mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dimiliki, pengalaman sebelumnya, serta potensi kelemahan yang perlu diperbaiki. Keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, menjadi bagian penting dalam proses ini, sehingga program pelatihan yang dirancang dapat mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Bawaslu berupaya memastikan bahwa setiap pengawas siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pemilu.

Setelah tahap identifikasi, Bawaslu melanjutkan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas yang terdiri dari bimbingan teknis dan pelatihan praktis. Kegiatan ini dirancang untuk membekali pengawas dengan pengetahuan yang relevan mengenai penanganan pelanggaran, pengawasan logistik, dan pengelolaan data. Melalui modul-modul yang interaktif, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga berlatih melalui simulasi situasi nyata yang mungkin mereka hadapi. Dengan melibatkan narasumber berpengalaman, Bawaslu memastikan bahwa pelatihan ini tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif dan berbasis praktik terbaik.

M. Dhofarul Muttaqiin
Koordinator Divisi SDM,Organisasi dan Diklat
Bawaslu Kabupaten Rembang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas pengawas adhoc oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 berakar dari kebutuhan mendesak untuk memastikan integritas dan transparansi proses pemilu. Pengawas adhoc, yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilihan. Dengan meningkatnya kompleksitas pemilu, tantangan yang dihadapi oleh pengawas pun semakin beragam, sehingga memerlukan upaya pengembangan kapasitas yang lebih intensif dan terstruktur.

Proses identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas menjadi langkah awal yang krusial. Melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc, Bawaslu dapat mengidentifikasi keterampilan yang perlu diperkuat serta potensi kelemahan yang harus diatasi. Keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan pengawasan yang ada. Dengan demikian, program pelatihan yang dirancang tidak hanya relevan tetapi juga menyeluruh, mencakup aspek-aspek penting dalam pengawasan pemilu.

Setelah identifikasi kebutuhan, Bawaslu melanjutkan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas yang terdiri dari bimbingan teknis dan modul pelatihan praktis. Program ini dirancang untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, termasuk penanganan pelanggaran dan pengawasan logistik. Metode pelatihan yang interaktif, seperti simulasi dan diskusi kelompok, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengawas dalam mengambil keputusan yang tepat di lapangan.

Monitoring pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas juga menjadi fokus utama Bawaslu. Dengan melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara, Bawaslu dapat menilai sejauh mana pengawas mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada pengawas agar mereka lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Peningkatan kapasitas pengawas adhoc menjadi bagian integral dari upaya ini, memastikan bahwa setiap pengawas siap dan mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Melalui kolaborasi yang erat antara Bawaslu, pengawas, dan masyarakat, diharapkan pemilu yang akan datang dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan pengawas adhoc, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Fokus utama dari peningkatan kapasitas ini adalah untuk memastikan bahwa pengawas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan mereka. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur, diharapkan pengawas dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pemilu dengan lebih percaya diri dan efektif.

Tahapan pertama dalam ruang lingkup ini adalah identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc melalui pemetaan keterampilan, pengalaman, dan potensi kelemahan. Kegiatan ini melibatkan masukan dari berbagai stakeholder, termasuk Bawaslu dan komunitas masyarakat sipil, untuk memastikan program pelatihan yang relevan dan komprehensif. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan secara sistematis.

Setelah tahap identifikasi, ruang lingkup pelaksanaan peningkatan kapasitas menjadi fokus utama. Bawaslu menyelenggarakan bimbingan teknis yang mencakup berbagai modul pelatihan, seperti penanganan pelanggaran dan pengawasan logistik. Metode pelatihan yang interaktif, seperti simulasi dan diskusi kelompok, dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Keterlibatan narasumber berkompeten juga menjadi bagian penting dalam proses ini untuk memberikan perspektif berbasis pengalaman.

Monitoring pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas juga merupakan bagian integral dari ruang lingkup laporan ini. Bawaslu melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara untuk menilai sejauh mana pengawas dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Proses monitoring ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada pengawas agar mereka lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga selama pemilu.

Dengan demikian, ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan proses dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan, hingga monitoring dan evaluasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengawas adhoc siap dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya pemilu yang adil, transparan, dan demokratis, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 adalah untuk memastikan bahwa pengawas adhoc, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Dengan meningkatkan kapasitas pengawas, diharapkan mereka dapat berkontribusi pada terciptanya pemilu yang transparan, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Salah satu maksud utama dari kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pengawas adhoc dalam menghadapi tantangan yang akan muncul selama pemilihan. Melalui analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas, Bawaslu dapat menentukan bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih, seperti penanganan pelanggaran, pengawasan logistik, dan pengelolaan data. Dengan pendekatan yang berbasis data, program pelatihan dapat disusun secara sistematis dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Tujuan selanjutnya adalah untuk melaksanakan pelatihan yang efektif dan terstruktur, yang mencakup berbagai aspek pengawasan pemilu. Melalui bimbingan teknis dan modul pelatihan yang dirancang dengan pendekatan praktis, pengawas adhoc akan dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi

yang mungkin terjadi selama pemilihan. Dengan melibatkan narasumber berkompeten, peserta pelatihan juga akan mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika pengawasan pemilu.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari maksud dan tujuan laporan ini. Bawaslu berkomitmen untuk melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara dan kegiatan kampanye untuk menilai sejauh mana pengawas dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan memberikan bimbingan langsung selama proses monitoring, Bawaslu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri pengawas dan mempersiapkan mereka menghadapi situasi yang tidak terduga.

Secara keseluruhan, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kapasitas pengawas adhoc. Melalui pendekatan yang terencana dan sistematis, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga pemilu yang akan datang dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Pengantar

Laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat kemampuan pengawas adhoc, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Dalam konteks demokrasi, pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawas menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ada dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam rangka mencapai hasil yang maksimal, Bawaslu Kabupaten Rembang membagi proses peningkatan kapasitas ini menjadi empat tahapan yang terstruktur. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, di mana dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc. Melalui pemetaan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, Bawaslu dapat menentukan bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih, sehingga program pelatihan yang disusun menjadi relevan dan menyeluruh.

Setelah tahap identifikasi, pelaksanaan peningkatan kapasitas menjadi fokus utama. Bawaslu menyelenggarakan bimbingan teknis yang dirancang untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Kegiatan ini mencakup berbagai modul pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, sehingga pengawas dapat langsung mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata. Melalui metode interaktif seperti diskusi kelompok dan simulasi, diharapkan peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat selama pemilihan.

Monitoring pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas juga menjadi bagian penting dari laporan ini. Bawaslu melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara, serta memberikan bimbingan kepada pengawas adhoc selama proses pemilu. Dengan

cara ini, Bawaslu memastikan bahwa pengawas dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan dengan baik. Sesi follow-up juga diadakan untuk mendiskusikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat direalisasikan di lapangan.

Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami komitmen Bawaslu Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kapasitas pengawas adhoc menjelang Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024. Dengan pendekatan yang sistematis dan terencana, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga pemilu yang akan datang dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

B. Gambaran Umum

laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 ini akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang diambil untuk mempersiapkan pengawas adhoc, termasuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Dalam konteks pemilu yang demokratis, pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas dan transparansi proses pemilihan. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengawas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan.

Proses peningkatan kapasitas ini dibagi menjadi empat tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, di mana Bawaslu melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc. Melalui pemetaan keterampilan dan masukan dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, Bawaslu dapat menetapkan bidang-bidang spesifik yang memerlukan perhatian, seperti penanganan pelanggaran dan pengawasan logistik. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pelatihan yang relevan dan efektif.

Setelah tahap identifikasi, Bawaslu melanjutkan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis. Pelatihan ini mencakup berbagai modul yang dirancang untuk membekali pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Metode pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok dan simulasi, digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, narasumber berkompeten diundang untuk

memberikan wawasan berbasis pengalaman, sehingga peserta dapat belajar dari praktik terbaik dalam pengawasan pemilu.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Bawaslu mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan bahwa semua pengawas memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam rapat ini, pembagian tugas dan persiapan logistik menjadi fokus utama, sehingga semua elemen yang terlibat dalam pemilihan dapat bekerja sama dengan baik. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawas di lapangan dan memastikan kelancaran proses pemilihan.

Monitoring pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas juga menjadi bagian penting dari laporan ini. Bawaslu melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara dan memberikan bimbingan kepada pengawas adhoc selama proses pemilu. Sesi follow-up diadakan untuk mendiskusikan praktik pengawasan yang telah dilakukan, sehingga pengawas dapat berbagi pengalaman dan solusi yang ditemukan saat bertugas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengetahuan dan keterampilan pengawas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

BAB III

ISI LAPORAN

A. PEMILIHAN UMUM 2024

Dalam Upaya mencapai hasil yang maksimal dalam peningkatan kapasitas pengawas adhoc Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang membagi empat tahapan, yang terdiri dari:

1. Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas

Pada tahap awal, dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kemampuan pengawas adhoc (Panwascam) dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Ini mencakup pemetaan keterampilan yang dimiliki, pengalaman sebelumnya, dan potensi kelemahan yang perlu ditangani agar pengawas siap menghadapi tantangan pemilihan umum 2024.

Berbagai masukan juga dihimpun dari stakeholder terkait, termasuk pihak Bawaslu dan komunitas masyarakat sipil, yang memberikan perspektif tentang tantangan pengawasan yang ada. Keterlibatan berbagai pihak ini menjamin bahwa program pelatihan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga menyeluruh.

Berdasarkan hasil identifikasi, sejumlah bidang kebutuhan spesifik ditetapkan, seperti penanganan pelanggaran, pengawasan logistik, dan pengelolaan data. Hal ini menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Selanjutnya, disusunlah prioritas kegiatan pelatihan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak jangka panjang. Prioritas ini mencakup Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran, Pengawasan Pemungutan Suara, dan Pengelolaan Data, yang merupakan aspek kritis dalam kesuksesan pemilu.

Akhirnya, dilakukan penyusunan rencana kegiatan peningkatan kapasitas yang mencakup jadwal, lokasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam memastikan pengawas adhoc siap dan mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik di pemilihan umum mendatang.

2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Pelaksanaan peningkatan kapasitas diantaranya dalam bentuk bimbingan teknis, dimulai dengan sesi pembukaan yang memperkenalkan tujuan dan pentingnya pelatihan bagi pengawas adhoc. Hal ini bertujuan untuk membangun motivasi dan pemahaman tentang peran strategis mereka dalam pemilihan umum.

Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan mencakup serangkaian modul, di antaranya Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa selama Masa Kampanye dan Masa Tenang. Setiap modul dirancang dengan pendekatan praktis agar peserta dapat secara langsung mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh.

Sesi pelatihan juga mencakup diskusi kelompok dan simulasi situasi nyata yang mungkin dihadapi oleh pengawas selama pemilihan. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat kemampuan peserta dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat.

Selama pelaksanaan pelatihan, peserta diberikan materi tambahan mengenai prosedur pengawasan logistik dan pengelolaan data pelanggaran. Materi ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa pengawas dapat mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif selama proses pengawasan.

Pihak Bawaslu juga melibatkan narasumber yang berkompeten, termasuk praktisi pengawasan pemilu dan akademisi, untuk memberikan perspektif yang berbasis bukti dan pengalaman nyata. Keberadaan narasumber ini memperkaya pengalaman belajar peserta dan membuka wawasan mereka terhadap berbagai dinamika yang mungkin terjadi.

Seluruh rangkaian pelatihan ditutup dengan sesi evaluasi, di mana peserta memberikan feedback tentang materi yang disampaikan dan metode pengajaran yang digunakan. Feedback ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan pelatihan di masa mendatang.

Berikut adalah table pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum 2024 dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) :

NO	KEGIATAN	MAKSUD DAN TUJUAN
1	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Meningkatkan kemampuan Panwascam dalam menangani pelanggaran dan sengketa selama masa kampanye
2	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Mengoptimalkan pengawasan selama masa tenang
3	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Logistik	Membekali Panwascam dengan pengetahuan terkait logistik pemilu
4	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Memastikan pemungutan suara dan penghitungan dilakukan sesuai regulasi
5	Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Membantu Panwascam dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu
6	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	Mengembangkan keterampilan dalam menangani perkara pelanggaran
7	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Meningkatkan kemampuan pengawasan lembaga Bawaslu
8	Bimbingan Teknis Pengawasan Laporan Dana Kampanye	Meningkatkan pemahaman tentang pengawasan dana kampanye
9	Bimbingan Teknis Pengawasan Logistik	Mengoptimalkan pengawasan logistik pemilu
10	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Kampanye	Memperkuat pengawasan selama masa kampanye
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Masa Tenang (Kab./Kota)	Memastikan tidak ada pelanggaran selama masa tenang
12	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Memastikan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan
13	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang PTPS	Memperkuat pengawasan pemungutan suara ulang
14	Bimbingan Teknis Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Meningkatkan keterampilan dalam pengawasan hasil pemilu

15	Bimbingan Teknis Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Memastikan proses pengucapan sumpah janji dilakukan dengan benar
16	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Pengelolaan barang bukti pelanggaran yang efisien
17	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan barang milik Negara
18	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan layanan informasi publik
19	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye (Kab./Kota)	Penanganan data pelanggaran yang efisien
20	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Tenang (Kab./Kota)	Pengelolaan data selama masa tenang
21	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara (Kab./Kota)	Meningkatkan pengelolaan data pelanggaran
22	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu (Kab./Kota)	Memastikan data penanganan pelanggaran yang akurat
23	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip
24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Memastikan dokumentasi dan publikasi yang baik
25	Bimbingan Teknis Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Meningkatkan manajemen administrasi dan kearsipan

Sumber : Jurnal kegiatan SDM OD Bawaslu Kabupaten Rembang 2024

Tabel kegiatan Bimbingan Teknis yang disusun diatas menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengawas adhoc, dalam berbagai aspek pengawasan pemilu. Setiap kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang esensial, mulai dari penanganan pelanggaran, pengawasan proses pemungutan suara, hingga pengelolaan data dan informasi publik. Dengan adanya pelatihan yang sistematis dan terfokus ini, diharapkan pengawas dapat melaksanakan tugas mereka secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menjaga integritas pemilu dan menciptakan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Berikut adalah table pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum 2024 dalam bentuk peningkatan kapasitas yang lain :

NO	MATERI PENINGKATAN KAPASITAS	MAKSUD DAN TUJUAN
1	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur dalam pemilu di tingkat kabupaten/kota
2	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Memperkuat kemampuan pengawasan di tingkat kecamatan
3	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran (Kabupaten/Kota)	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pada tingkat kabupaten/kota
4	Peningkatan kapasitas dan pembinaan penyelesaian sengketa	Mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa
5	Peningkatan kapasitas dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan	Memperkuat perencanaan dan penganggaran yang efisien dalam pengawasan pemilu
6	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Membekali pengetahuan tentang cara pengelolaan barang bukti dugaan pelanggaran logistik
7	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat	Meningkatkan kemampuan administrasi dan integrasi antara sekretariat dan lembaga
8	Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur administrasi dan konsolidasi sekretariat dan Komisioner Panwascam dan Pengawas D/K dalam pengawasan tahapan pemilu	Meningkatkan sinergi dalam pengawasan yang melibatkan semua pihak
9	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Meningkatkan struktur kelembagaan Bawaslu untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya
10	Peningkatan kapasitas pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota
11	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Mengembangkan kemampuan untuk menangani pelanggaran dalam logistik pemilu
12	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Meningkatkan pemahaman dan penanganan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye

13	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Memastikan pengawasan yang lebih baik selama masa tenang
14	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Meningkatkan keterampilan dalam menangani pelanggaran terkait pemungutan suara
15	Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Memastikan penanganan pelanggaran hasil pemilu yang lebih efektif
16	Peningkatan kapasitas Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk menertibkan alat peraga kampanye
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi kesekretariatan (Keuangan dan Kearsipan)	Meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi dalam sektor keuangan dan kearsipan
18	Peningkatan kapasitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Penguatan layanan hukum agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum pemilu
19	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Meningkatkan akses dan pemahaman terhadap hak-hak pemilih disabilitas
20	Peningkatan kapasitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Memperkuat pengetahuan dan partisipasi pemilih disabilitas
21	Peningkatan kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Meningkatkan keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu
22	Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Menghadiri Sidang PHPU	Meningkatkan pemahaman tentang proses dan penyampaian di sidang PHPU
23	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Meningkatkan kemampuan dalam menangani perselisihan hasil pemilu
24	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Memperkuat pemahaman dan penanganan perselisihan hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota
25	Peningkatan kapasitas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Meningkatkan perhatian pada perselisihan hasil di tingkat kecamatan
26	Peningkatan kapasitas sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Memastikan pengawasan dan penanganan hukum di tahapan logistic

Sumber : Jurnal kegiatan SDM OD Bawaslu Kabupaten Rembang 2024

B. PEMILIHAN 2024

1. Tahapan Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengawas adhoc, Bawaslu Kabupaten Rembang telah memulai tahapan identifikasi kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 melalui serangkaian rapat koordinasi. Tahapan ini menjadi krusial untuk memastikan pengawas yang terlibat dalam pemilihan umum 2024 memiliki pemahaman yang jelas dan kemampuan yang memadai. Rapat koordinasi pertama diadakan pada tanggal 8 Juni 2024, di Kantor Panwaslu Kecamatan, dengan fokus utama memastikan proses rekrutmen Pantarlih berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan memastikan bahwa Pantarlih yang terpilih memenuhi syarat, diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam pengawasan Pemilihan.

Setelah rapat awal tersebut, Bawaslu melanjutkan dengan rapat koordinasi yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2024. Dalam pertemuan ini, peserta membahas tentang pentingnya jaminan kualitas pelaksanaan coklit—proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Dalam diskusi ini, diungkapkan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait seperti PPD dan PPS sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang dapat mengganggu tahapan Pemilihan selanjutnya. Dengan demikian, semua pengawas diharapkan dapat memahami peran mereka dalam menjaga akurasi data pemilih.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang kembali mengadakan rapat koordinasi, kali ini dengan fokus pada pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan dan

pengawasan DPS dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembagian wilayah pengawasan DPS serta penjelasan teknis mengenai prosedur pengawasan menjadi inti dari pertemuan ini. Dengan demikian, pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi yang diadakan pada tanggal 25 September 2024 juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting. Pertemuan ini menghadirkan Panitia Pengawas Desa (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memastikan ada pemahaman yang jelas mengenai tugas masing-masing dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Koordinasi yang solid antara kedua lembaga ini diharapkan dapat memastikan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan valid, yang merupakan aspek krusial dalam menjamin keabsahan Pemilihan.

Dalam berbagai rapat koordinasi tersebut, penguatan hubungan antar pengawas menjadi elemen penting. Dengan pembagian tugas yang jelas dan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab masing-masing, setiap pengawas diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal. Hal ini juga membantu dalam mengurangi potensi kesalahan dalam pengumpulan dan pencatatan data pemilih, yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan.

Selanjutnya, semua hasil identifikasi kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 yang lebih terarah. Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 ini dirancang untuk mempersiapkan semua pengawas dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara hingga perhitungan suara. Dengan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 tersebut, diharapkan setiap pengawas dapat bekerja dengan maksimal, melaksanakan pengawasan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya tahapan identifikasi kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 ini juga terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti setiap rapat dan kegiatan. Setiap pengawas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait dengan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas individu, tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan Pemilihan ke depan.

Dalam riset awal yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam kapasitas pengawas, seperti pemahaman terhadap regulasi terbaru, keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan, serta kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain. Semua temuan ini menjadi acuan penting dalam merancang materi Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 yang relevan dan aktual.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam identifikasi kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 pengawas adhoc adalah bukti komitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam Pemilihan. Dengan adanya Peningkatan Kapasitas Pengawas Adhoc dalam Pemilihan 2024 yang terencana dan terstruktur, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, sehingga integritas Pemilihan yang demokratis dan transparan dapat terwujud.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya berupaya menciptakan kapasitas pengawas yang handal, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilihan yang dijalankan. Upaya ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk menyongsong Pemilihan 2024 dengan semangat keadilan dan akuntabilitas yang tinggi.

2. Tahapan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Setelah proses identifikasi kebutuhan pelatihan selesai, Bawaslu Kabupaten Rembang melanjutkan dengan tahap pelaksanaan peningkatan kapasitas pengawas adhoc menjelang Pemilihan Umum 2024. Tahap ini sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pengawas, termasuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Rapat koordinasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara diadakan pada tanggal 28 Oktober 2024, di mana seluruh peserta sepakat mengenai aspek-aspek penting yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan suara.

Pembagian tugas dan persiapan logistik menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Hal ini dicapai untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam Pemilihan, termasuk Panwalu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing. Dengan pembagian tugas yang baik, diharapkan proses pemilihan akan berjalan dengan aman, transparan, dan tanpa hambatan yang berarti. Rapat ini juga membantu

memperkuat kerjasama antar pengawas dan mengoptimalkan fungsi mereka di lapangan.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, rapat koordinasi pelantikan dan pembekalan PTPS juga diadakan. Dalam pertemuan ini, peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan di lokasi pemungutan suara. Pengenalan penggunaan aplikasi SIWASLIH menjadi salah satu bagian penting dari pembekalan ini. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelaporan dan monitoring, sehingga anggota PTPS dapat melaporkan kejadian di lapangan secara real-time dan efisien.

Rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 17 November 2024 menjadi momen penting untuk sinkronisasi tugas antara PKD dan PTPS. Di sini, peserta berdiskusi mengenai pemetaan potensi masalah yang mungkin terjadi di TPS. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran atau hambatan yang dapat mengganggu proses pemilihan, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.

Selama tahap peningkatan kapasitas, peserta juga diberikan panduan teknis dan pemahaman mengenai regulasi terbaru terkait pengawasan Pemilihan. Ini menjadi langkah yang sangat penting agar semua pengawas memahami peran mereka dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi di lapangan. Pemahaman tentang regulasi terbaru membantu pengawas dalam menegakkan aturan dan mengambil tindakan yang tepat ketika ada pelanggaran yang terjadi.

Simulasi situasi lapangan juga menjadi bagian dari pelaksanaan peningkatan kapasitas. Dalam simulasi ini, pengawas dilatih untuk menghadapi berbagai konflik atau insiden yang mungkin terjadi di TPS. Melalui latihan ini, mereka diharapkan dapat merespons dengan cepat dan efektif jika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan segera, seperti kericuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilihan.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek psikologis. Pengawas dilatih untuk mengelola stres dan tekanan yang mungkin muncul selama proses pemungutan suara. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pengawas dapat menjaga fokus dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas.

Secara keseluruhan, tujuan dari pelaksanaan peningkatan kapasitas ini adalah untuk mempersiapkan pengawas agar dapat melaksanakan tugas mereka secara

profesional dan efektif. Semua upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik, menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilihan.

Berikut adalah table pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan 2024 :

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
1	30 Mei 2024	Koordinasi Persiapan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa	Tercapainya kesepakatan mengenai struktur dan jadwal pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta penetapan peran dan tanggung jawab anggota di tingkat kelurahan/desa.
2	7 Juni 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih	Menjamin proses pemutakhiran daftar pemilih berjalan transparan dan akuntabel, serta memastikan partisipasi publik dalam proses rekrutmen.
3	21 Juni 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Coklit Data Pemilih Pilkada	Tercapainya pemahaman yang sama tentang prosedur coklit, serta penyeragaman teknik dan alat yang digunakan dalam pencocokan data pemilih.
4	6 Juli 2024	Rapat Koordinasi dengan tema “Orientasi Pengawasan dalam Pemilihan Serentak 2024”	Peningkatan pemahaman anggota terkait tugas dan fungsi pengawasan, serta mengenalkan tantangan yang akan dihadapi dalam proses pemilihan serentak.
5	10 Juli 2024	Rapat koordinasi Keuangan	Penentuan alokasi dan penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan, serta penguatan kontrol anggaran di setiap tingkatan.
6	22 Juli 2024	Rapat Koordinasi Dengan Panwaslu Kecamatan	Pembahasan dan penanganan pelanggaran yang dihadapi serta langkah-langkah preventif untuk menghindari pelanggaran di masa depan.
7	17 Juli 2024	Rapat Penyusunan Database Pengawas Adhoc Pemilihan 2024	Tersusunnya database pengawas adhoc yang komprehensif dan siap digunakan saat pemilihan 2024, termasuk pembagian wilayah dan tugas.
8	13 Agustus 2024	Rapat koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran	Penetapan protokol penanganan pelanggaran yang jelas, serta peningkatan kemampuan teknis pengawas dalam menangani insiden

			pada hari H pemilihan.
9	15 Agustus 2024	Launching Buku Kinerja SDM Pengawas Adhoc Pemilu 2024	Dokumentasi kinerja penuh yang bisa digunakan sebagai alat ukur evaluasi dan peningkatan kinerja pengawas dalam pemilihan mendatang.
10	22 Agustus 2024	Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Rembang	Meningkatnya keterampilan teknis dan manajerial SDM dalam pengelolaan data dan pengawasan, yang siap diimplementasikan dalam pemilihan.
11	23 Agustus 2024	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	Penetapan jadwal, teknis, dan mekanisme pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk penguatan komunikasi antar lembaga.
12	28 Agustus 2024	Rapat Penyusunan DIM Pembentukan Pengawas TPS Pemilihan tahun 2024	Tersusunnya Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang akan dibahas dan ditindaklanjuti dalam pembentukan pengawas TPS, serta kelayakan pengawas yang akan ditugaskan.
13	13 Spetember 2024	Rapat Pembentukan PTPS Pada Pemilihan Tahun 2024	Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah ditetapkan, termasuk pelatihan orientasi bagi anggota PTPS.
14	23 September 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Kampanye	Penyusunan rencana pengawasan kampanye, termasuk strategi pemantauan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
15	23 September 2024	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS	Tercapainya kesepakatan tentang pembagian tugas antara PTPS dan KPPS dalam pengawasan pemungutan suara serta penyusunan struktur pelaporan yang efektif.
16	3 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye	Penegasan regulasi terkait kampanye pemilihan, serta peningkatan sinergi di antara semua pihak dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran kampanye.
17	4 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan KPPS dan Logistik	Mempersiapkan pembentukan KPPS yang tepat dengan pengaturan logistik yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan suara.
18	24 Oktober 2024	Rapat koordinasi Pengawasan Penetapan hasil Pemilu	Penyusunan skema pengawasan akhir untuk menentukan hasil pemilu dan mekanisme penanganan jika terdapat sengketa terkait dengan hasil.
19	27 Oktober 2024	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih)	Peningkatan pemahaman pengguna mengenai aplikasi Siwaslih, serta penetapan rencana sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan terkait efisiensi dan efektivitas pengawasan menggunakan teknologi.
20	31 Oktober	Rapat Koordinasi	Persiapan matang untuk pelantikan dan

	2024	Persiapan Pelantikan dan Pembekalan Pengawas TPS	pembekalan pengawas TPS, termasuk penguatan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan pemungutan suara.
21	5 November 2024	Fasilitas Pembinaan Aparatur Administrasi Dan konsolidasi Sekretariat	Peningkatan keterampilan administrasi dan pengelolaan sekretariat yang lebih baik untuk mendukung fungsi pengawasan.
22	7 November 2024	Fasilitasi Pembinaan Aparatur Administrasi Dan Konsolidasi Sekretariat	Konsolidasi lebih baik antara sekretariat dan unit kerjanya, serta penyusunan laporan yang lebih akurat dan terstruktur untuk mendukung kinerja pengawasan.
23	8 November 2024	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Secara Tatap Muka	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilihan, serta memperkuat partisipasi publik.
24	8 November 2024	Rapat koordinasi dalam rangka Persiapan Penertiban Alat Peraga kampanye Pemilihan Tahun 2024	Tercapainya rencana penertiban alat peraga kampanye yang sistematis untuk memastikan pemilihan yang bersih dan adil.
25	21 November 2024	Rapat Koordinasi Anggaran Dan Publikasi Pengawasan Pemilihan Tahun 2024	Penentuan anggaran untuk pengawasan pemilihan, termasuk strategi publikasi hasil pengawasan agar terjangkau dan efektif.
26	21 November 2024	Merawat Sinergitas Antara Penyelenggara Pemilu dengan Stakeholder	Tercapainya kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi demi kelancaran pemilihan.
27	23 November 2024	Rapat Kerja Teknis Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Persiapan teknis yang lengkap untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pelatihan bagi pengawas dan petugas di lapangan.
28	3 Desember 2024	Rapat Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan	Peningkatan kapasitas anggota Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan, serta penetapan strategi yang jelas dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Sumber : Jurnal kegiatan SDM OD Bawaslu Kab.Rembang 2024

PETAKAN POTENSI KERAWANAN MUTARLIH, BAWASLU REMBANG GELAR RAKOR DENGAN PANWASLU KECAMATAN

REMBANG – Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bawaslu Rembang mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada Jum'at (21/6).

Acara yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Rembang dengan mengundang Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang dengan harapan sebagai sarana tempat bertukar pikiran dan informasi dalam memetakan potensi kerawanan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Bayanul Lail menjelaskan "Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian." Jelas Bayan saat penyampaian materinya.

Ia juga menambahkan, titik-titik kerawanan pemutakhiran daftar pemilih, melupitu: Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih, Kerawanan Pembentukan Pantarlih, Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT), Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK), Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, Kerawanan Pasca Penetapan DPT.

Berita selengkapnya bisa kunjungi
rembang.bawaslu.go.id

BAWASLU REMBANG LUNCURKAN BUKU "AKU MENGAWASI MAKA AKU ADA"

REMBANG – Bawaslu Rembang meluncurkan buku berjudul "Aku Mengawasi Maka Aku Ada." Acara tersebut diselenggaran Bawaslu Rembang yang bertempatkan di Sanggar Budaya Area Komplek Musium Kartini Kabupaten Rembang dengan mengundang seluruh ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang, pada Kamis (15/8).

Pada peluncuran tersebut, Bawaslu Rembang juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Dalam arahannya ia mengapresiasi konten yang tertuang dalam buku tersebut, karena mengambil dan memotret segala kejadian dan bentuk pengawasan yang ada diseluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan detail.

Selain itu juga Anggota Bawaslu Rembang dan sekaligus sebagai penulis buku, M. Dhofarul Muttaqiin menyampaikan bahwa penulisan buku ini sebagai bentuk Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat yang juga dilakukan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

"Pesan utama dalam buku ini, menggambarkan pentingnya posisi pengawas ad-hoc pemilu dalam proses pengawasan Pemilu 2024." Jelas Mutt.

Selain itu Mutt juga menambahkan, Judul buku terinspirasi dari ungkapan oleh seorang filsuf dari Prancis yaitu Descartes "Aku Berfikir Maka Aku Ada", yang berarti keberadaan pengawas ad-hoc yang bersifat sementara tetapi sangat penting peranannya.

Berita selengkapnya bisa kunjungi
rembang.bawaslu.go.id

SAAT MASA AKHIR JABATAN PANWASCAM, BAWASLU BERIKAN PESAN DAN KESAN

REMBANG – Pada masa akhir jabatan Panwaslu Kecamata se-Kabupaten Rembang, Bawaslu Rembang memberikan pesan dan kesan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang, pada acara "Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dengan Tema : Persiapan Masa Akhir Jabatan Panwaslu Kecamatan" yang diselenggarakan di Hotel Pollos Rembang, Selasa – Rabu (21-22/1).

Pada kesempatan pertama, M. Dhofarul Muttaqiin selaku Anggota Bawaslu Rembang yang membidangi Divis SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, menyampaikan sebelum berakhirnya masa jabatan Panwascam, penting sekali mengingatkan Panwascam akan kewajiban-kewajibannya, diantaranya adalah Laporan, baik Laporan Akhir Tahun maupun Laporan Keuangan, setelah itu adalah pengembalian aset yang dipinjamkan dari Pemerintah Kecamatan,misalnya kantor mebelair dan lain-lainnya.

LAGI DAN LAGI, BAWASLU REMBANG GEMBORKAN POTENSI KERAWANAN SAAT PENETAPAN DPT

REMBANG – "Salah satu cara Bawaslu untuk menjaga kualitas daftar pemilih pada Pemilihan 2024 adalah dengan menyusun peta kerawanan, melakukan pengawasan, mencegah potensi pelanggaran menyampaikan materi pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih dengan Tema "Persiapan Rekapitullasi DPT Pemilihan Tahun 2024", yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Rembang (16/9).

Selain itu juga Bayan menjelaskan, bahwasannya jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat Pengawas TPS harus mengerti tiga kategori data pemilih. Kategori pertama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten menjadi DPT.

Kategori Kedua adalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) merupakan Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Kategori Ketiga adalah Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan & memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

"Diharuskan para jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat Pengawas TPS mengerti tiga kategori tersebut. Karena penyebab utama terjadinya PSU di salah satu TPS di Kecamatan Rembang dan Kragan saat proses pemungutan suara Pemilu 2024 penyebab utamanya adalah kesalahan dalam memahami kategori data pemilih". Tegas Bayan.

Masih di kesempatan yang sama Bayan juga menyampaikan rekap data saran perbaikan yang sudah dilayangkan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang kepada jajaran PPK sejumlah 639 saran perbaikan dengan rincian, 447 saran perbaikan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 192 saran perbaikan Pemilih Memenuhi Syarat (MS).

Pada acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Rembang tersebut dihadiri seluruh Anggota dan Staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas.

Berikut adalah table pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dalam Pemilihan 2024 :

No	Tanggal	Tempat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Sabtu, 08 Juni 2024	Kantor Panwaslu Kecamatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pembentukan Pantarlih	Memastikan proses rekrutmen pantarlih dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi syarat.
2	Minggu, 23 Juni 2024	Kantor Panwaslu Kecamatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Coklit	Memastikan proses coklit berjalan baik, data pemilih akurat, dan tidak ada pelanggaran. Koordinasi yang baik antara pihak terkait sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
3	Selasa, 20 Agustus 2024	Kantor Panwaslu Kecamatan	Rapat Koordinasi Pengawasan DPS	Memastikan penyusunan dan pengawasan DPS berlangsung transparan, akurat, dan sesuai peraturan. Penjelasan teknis dan pembagian wilayah pengawasan menjadi fokus utama.
4	Rabu, 25 Septemb er 2024	Pendopo Kecamatan	Rapat Koordinasi PPD dan PPS se-Kecamatan	Penjelasan tugas PPD dalam pencocokan data pemilih, memastikan data valid, serta memperkuat hubungan koordinasi antara PPD dan PPS untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih.
5	Senin, 28 Oktober 2024	Kantor Panwaslu Kecamatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Kesepakatan mengenai aspek penting untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara, termasuk logistik, pembagian tugas, dan pengamanan. Semua pihak diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
6	Rabu, 30 Oktober 2024	Kantor Panwaslu Kecamatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan dan Pembekalan PTPS & SIWASLIH	Meningkatkan pemahaman PTPS tentang tugas dan penggunaan aplikasi SIWASLIH. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai peraturan dan melaporkan pelanggaran

				secara real-time.
7	Minggu, 17 Novemb er 2024	Pendopo Kecamatan	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara PPD & PTPS Se-Kecamatan	Sinkronisasi tugas PPD dan PTPS, pemetaan potensi masalah, peningkatan kapasitas, serta penyusunan strategi penanganan pelanggaran di lapangan. Evaluasi persiapan dan hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Sumber : Jurnal kegiatan SDM OD Bawaslu Kab.Rembang 2024

Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama Panwaslu Desa se-Kecamatan Sarang (12/6)

C. Monitoring Pelaksanaan hasil Peningkatan Kapasitas dalam Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu Kabupaten Rembang mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengawas adhoc dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum 2024. Salah satu langkah utama yang diambil adalah menerapkan mekanisme tindak lanjut setelah pelatihan. Bawaslu menetapkan sesi follow-up yang berfungsi untuk mendiskusikan praktik pengawasan yang telah dilakukan peserta. Dengan cara ini, diharapkan pengawas dapat berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi yang ditemukan saat bertugas, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat direalisasikan di lapangan.

Monitoring menjadi aspek penting dalam memastikan efektifitas pelatihan yang diberikan. Bawaslu melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara serta dalam kegiatan kampanye. Observasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan pengawas adhoc dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan. Selama proses monitoring, Bawaslu juga memberikan bimbingan langsung kepada pengawas jika diperlukan, sehingga mereka bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi situasi yang tidak terduga selama proses pemilu.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul di lapangan, Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan sistem pelaporan rutin. Dengan sistem ini, pengawas adhoc diberikan saluran untuk melaporkan tantangan yang mereka hadapi saat mengawasi. Respons yang cepat dari Bawaslu sangat penting agar pengawas merasa didukung dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi yang penuh tekanan seperti pemilu, kecepatan dalam merespons laporan tantangan juga berkontribusi pada kelancaran pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, komunikasi yang baik antara pengawas adhoc dan Bawaslu sangat ditekankan. Bawaslu menjaga alur komunikasi yang terbuka agar pengawas dapat dengan mudah meminta klarifikasi atau bantuan teknis saat diperlukan. Keberadaan saluran komunikasi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pengawas, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang relevan dapat

disampaikan dengan cepat, sehingga pengawasan pun dapat dilakukan secara optimal.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap kegiatan pengawasan juga dilaksanakan oleh Bawaslu. Melalui analisis terhadap pelanggaran yang terjadi dan cara penanganannya oleh pengawas, Bawaslu dapat memperbaiki prosedur yang ada. Hasil pengawasan ini kemudian dilaporkan dan dibahas dalam forum bersama, di mana semua pengawas adhoc akan berbagi pengalaman dan pelajaran yang didapatkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawas adhoc secara berkelanjutan, sehingga integritas dan keadilan dalam Pemilu 2024 dapat terjaga dengan baik.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Evaluasi dari laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi pengawas adhoc. Proses identifikasi kebutuhan yang dilakukan di tahap awal terbukti efektif dalam menentukan bidang-bidang spesifik yang perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, Bawaslu berhasil mengumpulkan masukan yang komprehensif, sehingga program pelatihan yang disusun menjadi relevan dan menyeluruh.

Pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Modul-modul pelatihan yang dirancang dengan pendekatan praktis membantu peserta untuk langsung mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh. Metode interaktif, seperti diskusi kelompok dan simulasi, tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan di situasi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, yang sangat penting dalam konteks pemilu.

Rapat koordinasi yang dilakukan menjelang pemungutan suara menjadi momen penting dalam memastikan semua pengawas memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Pembagian tugas dan persiapan logistik yang dilakukan dalam rapat ini membantu memperkuat kerjasama antar pengawas, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan aman dan transparan. Pengenalan aplikasi SIWASLIH sebagai alat bantu pelaporan juga menunjukkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pengawasan di lapangan.

Monitoring pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi juga melakukan tindak lanjut untuk memastikan pengawas dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Observasi langsung di lokasi pemungutan suara dan kegiatan kampanye memberikan gambaran nyata tentang kemampuan pengawas dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Bimbingan langsung yang diberikan selama proses ini sangat membantu pengawas untuk merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi situasi yang tidak terduga.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kapasitas pengawas adhoc telah memberikan hasil yang positif. Dengan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan inovatif, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga Pemilihan Umum 2024 dan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, adil, dan transparan. Namun, feedback dari peserta pelatihan juga perlu dipertimbangkan untuk perbaikan berkelanjutan dalam program-program pelatihan di masa mendatang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan laporan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Pertama, Bawaslu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program pelatihan yang telah dilaksanakan. Dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta dan pengawas yang terlibat, Bawaslu dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan menyesuaikan materi pelatihan agar lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kedua, penting untuk memperkuat kolaborasi dengan stakeholder lain, seperti lembaga masyarakat sipil dan akademisi, dalam merancang dan melaksanakan pelatihan. Keterlibatan mereka dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu-isu pengawasan pemilu. Dengan membangun jaringan yang solid, Bawaslu dapat mengakses sumber daya tambahan dan pengalaman praktis yang dapat memperkaya pelatihan yang diberikan kepada pengawas adhoc.

Ketiga, Bawaslu disarankan untuk mengembangkan modul pelatihan yang lebih spesifik dan berbasis situasi nyata yang mungkin dihadapi pengawas di lapangan. Misalnya, pengembangan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal dapat membantu pengawas memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pemilu. Pendekatan ini dapat meningkatkan kesiapan pengawas dan membuat mereka lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan.

Keempat, penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu perlu ditingkatkan. Bawaslu dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memudahkan pengawas dalam melaporkan temuan dan pelanggaran secara real-time. Selain itu, pelatihan tentang penggunaan teknologi ini harus menjadi bagian integral dari program peningkatan kapasitas agar pengawas tidak hanya memahami cara kerja sistem, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Terakhir, Bawaslu perlu menetapkan mekanisme tindak lanjut yang lebih terstruktur setelah pelatihan. Sesi follow-up yang lebih sering dan terjadwal dapat membantu pengawas untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Dengan cara ini, Bawaslu tidak hanya dapat memantau penerapan pengetahuan yang telah diberikan, tetapi juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul, sehingga pengawas dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas mereka selama pemilu.

BAWASLU KABUPATEN REMBANG
Jl. Gatotsubroto No. 07, Kutoharjo, Rembang

Bawaslu Rembang